

**DAMPAK RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
(RIPK) TAHUN 2016-2032 TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

TESIS

OLEH:

FITRIA DESWIKA

2520831002



**MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026**

ABSTRACT

Name : **Fitria Deswika**

Program Study : **Magister Ilmu Politik**

Title : ***The Impact of the 2016–2032 Tourism Development Master Plan on Local Governance Revenue and Community Economic Welfare in Lima Puluh Kota Regency***

This study examines the impact of the implementation of the Lima Puluh Kota Regency Tourism Development Master Plan (RIPK) 2016–2032 on Locally Generated Revenue and community economic welfare. The research departs from an empirical paradox: a surge in tourist arrival reaches 749,139 people in 2022 was not followed by a recovery of tourism local revenue to pre-pandemic levels, nor did it generate a tangible income increase for local MSMEs. The study employs a qualitative approach using a case study method through in-depth interviews, field observation, and documentation, drawing on two main analytical frameworks: Campbell's Policy Feedback Theory (2012) and McConnell's Policy Failure Theory (2010). The findings show that the RIPK experienced a multidimensional economic transmission failure. In terms of resource effects, benefits to the community were unevenly distributed: the accommodation sector grew by 13.09% in 2022, while the retail trade sector the primary livelihood space for local MSMEs grew by only 5.68%. The self-managed model in Kapalo Banda Taram, with its profit-sharing scheme, generated more direct economic impact for the community compared to Lembah Harau, which is managed by the local tourism agency, indicating that community-based governance design is more effective in distributing economic benefits. In terms of interpretive effects, the absence of the RIPK from the considerations of the 2021–2026 Disparpora Strategic Plan created a bureaucratic disconnection that weakened the policy's binding force. All three dimensions of McConnell's failure typology were also identified: process failure, program failure, and an escalating political failure. This study concludes that the Tourism-Led Growth Hypothesis does not operate automatically in regions with limited fiscal capacity, and requires a value capture mechanism that favors the local economy, consistent fiscal commitment, and integrated planning between strategic and operational documents.

Keywords: *RIPK, Locally Generated Revenue, Community Economy, Policy Impact, Lima Puluh Kota Regency.*

ABSTRAK

Nama :Fitria Deswika

Program Studi :Magister Ilmu Politik

Judul :Dampak Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPK) Tahun 2016–2032 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota

Penelitian ini mengkaji dampak implementasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPK) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016–2032 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perekonomian masyarakat. Titik berangkat penelitian adalah paradoks empiris, lonjakan kunjungan wisatawan hingga 749.139 orang pada tahun 2022 tidak diikuti pemulihan PAD dari sector pariwisata ke level pra-pandemi dan tidak menghasilkan peningkatan pendapatan yang terasa bagi pelaku UMKM lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, dengan dua kerangka teori utama: *Policy Feedback Theory* Campbell (2012) dan *Policy Failure Theory* McConnell (2010). Hasil penelitian menunjukkan bahwa RIPK mengalami kegagalan transmisi ekonomi yang bersifat multidimensional. Dari sisi *resource effects*, manfaat bagi masyarakat tidak merata, sektor akomodasi tumbuh 13,09% pada 2022 sementara sektor perdagangan eceran yang menjadi ruang hidup UMKM lokal hanya tumbuh 5,68%. Model pengelolaan swadaya Kapalo Banda Taram dengan skema bagi hasil membawa dampak ekonomi langsung kepada masyarakat dibanding Lembah Harau yang dikelola oleh dinas, menunjukkan bahwa desain tata kelola berbasis komunitas lebih efektif dalam mendistribusikan manfaat ekonomi. Dari sisi *interpretive effects*, absennya RIPK dalam konsiderans Renstra Disparpora 2021–2026 menciptakan diskoneksi birokrasi yang melemahkan daya ikat kebijakan. Ketiga dimensi kegagalan McConnell juga teridentifikasi, kegagalan proses, kegagalan program, dan kegagalan politik yang bersifat eskalatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Hipotesis Tourism-Led Growth* tidak bekerja secara otomatis dalam konteks daerah dengan kapasitas fiskal terbatas, dan membutuhkan mekanisme *value capture* yang berpihak pada ekonomi lokal, komitmen fiskal yang konsisten, serta perencanaan yang terintegrasi antara dokumen strategis dan operasional.

Kata kunci: RIPK, Pendapatan Asli Daerah, Perekonomian Masyarakat, Dampak Kebijakan, Kabupaten Lima Puluh Kota